

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Menurut Suryawati (2005: 122) Kemiskinan dimana yang keadaan terjadi kekurangan hal-hal biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Kemiskinan itu sendiri dapat juga didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan

standart hidup minimum.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program Keluarga Harapan, pertamakali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari UU no 40 tahun 2014 tentang jaminan sosial, inpres no 3 tahun 2010 tentang program penanggulangan pembangunan yang berkeadilan dan Perpres no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi ketentuan.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk membantu masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek. Selain itu Program Keluarga Harapan merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Implementasi Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat berjalan

dengan optimal sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan. Implementasi dari program ini harus berjalan dengan baik sehingga masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin yang mengetahui bahwa Program Keluarga Harapan ini dapat menjadi jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi permasalahan kemiskinan.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin, memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Karena apabila penghasilan yang mereka dapatkan rendah, maka hal tersebut dapat menyebabkan keluarga miskin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan maupun pendidikan.

Program ini telah ditegaskan dalam Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program tersebut merupakan bantuan tunai bersyarat atau yang juga dikenal di kalangan dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) sebagai upaya percepatan 3 penanggulangan kemiskinan dan juga untuk menurunkan kesenjangan (gini ratio) yang diharapkan program ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dimana mereka wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sasaran program ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang wajib memiliki kriteria diantaranya yaitu :

Tabel 1.1

Komponen penerimaan PKH pada tahun 2022

Komponen	Kriteria
Kesehatan	a. Ibu hamil / Menyusui
	b. Anak usia dini (0-6 tahun) maksimal 2 anak
Pendidikan	a. Siswa sekolah dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sedejarajat
	b. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau Sederajat)
	c. Siswa sekolah Menengah atas (SMA Madrasah Aliyah (MA) atau sedejarajat
	d. Anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
Kesejahteraan	a. Lanjut Usia (Lansia) mulai dari > 70 tahun
Sosial	b. Penyandang disabilitas, terutama disabilitas berat

Sumber : Buku pedoman PKH, hal 22.

Sejak ditetapkannya bantuan sosial ini pada tahun 2007, jumlah KPM program keluarga harapan meningkat secara bertahap, dan hingga saat ini pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan program keluarga harapan masyarakat di Indonesia telah mencapai 10 juta penerima yang telah dilaksanakan di 34 provinsi yang terdiri dari 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan, (Buku Pedoman PKH 2021- 2024, 2021). Dari 30 Kecamatan yang berada di Kota Bandung dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang merupakan data sebaran tingkat kemiskinan di beberapa Kecamatan yang berada Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Sebaran Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Kecamatan kota Bandung Tahun 2022

Kecamatan	Kelurahan	Desil	Desil	Desil	Desil	Total
		I	II	III	IV	
Andir	Campaka	172	319	206	255	952
Antapani	Antapani Wetan	195	261	220	244	900
Babakan Ciparay	Margasuka	38	184	103	103	718
Batununggal	Binong	154	388	290	342	1174
Bojongloa Kidul	Cibaduyut	387	347	126	73	933
Cibeunying Kaler	Cigadung	164	358	295	399	1116
Kiaracondong	Babakan Sari	364	529	495	738	2126
Lengkong	Burangrang	168	152	122	166	608
Mandalaati	Sindang jaya	76	186	139	266	1867
Rancasari	Derwari	287	459	292	145	1183

Sumber: *data.bandung.go Dinas Sosial Kota Bandung. Data Sebaran Kemiskinan Kota Bandung, (Oktober 2022)* (Diakses 25 oktober 2022)

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya jumlah penerima bantuan program keluarga harapan terdapat di Kecamatan Kiaracondong khususnya di wilayah Kelurahan Babakan Sari, dan kedua terbanyak yaitu Kecamatan Batununggal khususnya di wilayah Kelurahan Binong.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang banyak, tentunya tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. adanya Realisasi Program Keluarga Harapan di Kota Bandung sendiri sudah berjalan dari tahun 2013 dan terlaksana sesuai dengan harapan sehingga pelaksanaan program ini terbilang sudah cukup baik. Namun dalam implementasi program keluarga harapan tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan dalam implementasi program keluarga harapan yang sangat menonjol

yaitu mengenai kelayakan dari peserta penerima bantuan program keluarga harapan itu sendiri.

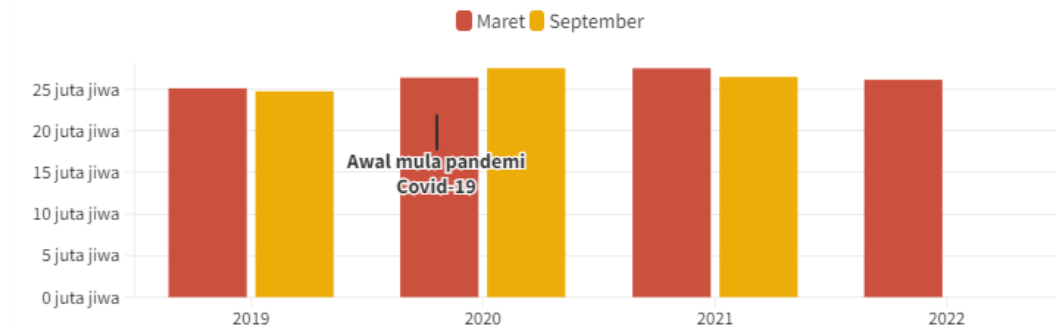
Negara Indonesia pada saat ini masih termasuk kedalam kategori Negara berkembang yang dimana kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup rumit, padahal Negara Indonesia sendiri terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah mulai dari sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Tetapi hal ini tidak menjadikan sebuah jaminan masyarakatnya akan terus sejahtera, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang baik dari pemerintahnya mulai dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia. Memiliki populasi penduduk yang sangat besar di seluruh dunia sehingga membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan yang dimana permasalahan ini masih terus berlanjut hingga saat ini.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai Berikut:

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Maret dan September 2019 - 2022

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia



Gambar 1.1

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat dilihat dari gambar diatas Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa yang dirilis BPS pada September 2021, maka jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan pada Maret lalu mengalami penurunan. Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin per September tahun lalu sebesar 26,5 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,71 persen. Kemudian jika dibandingkan secara tahunan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 menurun 1,38 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Maret 2022 menurun 0,60 persen jika dibandingkan dengan rasio pada Maret tahun lalu. Namun, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Maret 2022 belum menyamai capaian sebelum pandemi. Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan pada September 2019—publikasi terakhir

sebelum *pandemic* masing-masing 24,78 juta jiwa dan 9,22 persen. Ketika pandemi bermula pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat jadi 26,42 juta jiwa dan tingkat kemiskinan menjadi 9,78 persen.

Garis Kemiskinan di Indonesia



Gambar 1.2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat dari gambar di atas BPS menetapkan garis kemiskinan Maret 2022 sebesar Rp 504.469 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp 377.598 per kapita per bulan untuk pengeluaran makanan, dan sisanya untuk pengeluaran bukan makanan. Dengan kata lain, jika pengeluaran seseorang dalam sebulan di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. temuan BPS menunjukkan bahwa rata-rata anggota rumah tangga miskin pada Maret 2022 berjumlah 4,74 orang. Dengan demikian, rumah tangga miskin dikategorikan sebagai rumah tangga dengan pengeluaran di bawah rata-rata Rp 2.395.923 per bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tidak terstruktur yang penulis lakukan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH, antara lain dalam komunikasi pada saat Program PKH tersebut diimplementasikan. tidak cepatnya pemberian solusi mengenai masyarakat yang mendapatkan masalah mengenai penerimaan bantuan sosial dikarenakan susahny menjalin komunikasi, kemudian para pelaksana yang masih terdapat kurang tanggap kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.

Maka untuk mengetahui apakah implementasi program keluarga harapan (PKH) di dinas sosial kota bandung sudah optimal atau belum. Oleh sebab itu, untuk mengetahui program Program Keluarga Harapan (PKH) maka peneliti berminat melakukan penelitian terhadap permasalahan tentang ‘Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Bandung’

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.1.1 Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang diatas, agar suatu masalah yang tercermin dalam konteks penelitian lebih spesifik pada suatu fokus penelitian sehingga dapat memberikan kejelasan serta dapat mencerminkan pokok masalah yang diteliti maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Bandung sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan yang menjadi penghambat dalam penerapan program.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan melihat luasnya cakupan masalah di atas, maka penulis menganggap penting merumuskan masalah yang menjadi bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandung?
2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis yaitu Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh dan bagi

pengembangan Ilmu Administrasi Negara umumnya, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Program keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi dinas sosial Kota Bandung sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat.